

**ANALISIS EFISIENSI LAYANAN PEMERINTAH DAERAH
PADA PENDIDIKAN SMP DI PROVINSI SUMATERA BARAT:
PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



OLEH

RAFIQ MUMTAZA

NIP/NIM : 2018/18060047

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

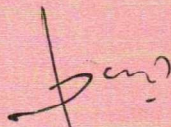
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI LAYANAN PEMERINTAH DAERAH PADA
PENDIDIKAN SMP DI PROVINSI SUMATERA BARAT:
PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

NAMA : Rafiq Mumtaza
BP/NIM : 2018/18060047
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

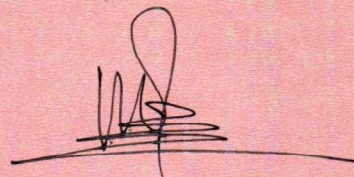
Padang, 4 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,



Dr. Noyva Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan oleh :
Pembimbing,



Dr. Muhammad Irfan, SE, M.Si
NIP. 19770409200312 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


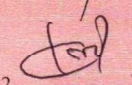
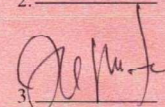
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS EFISIENSI LAYANAN PEMERINTAH DAERAH PADA
PENDIDIKAN SMP DI PROVINSI SUMATERA BARAT:
PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)**

Nama : Rafiq Mumtaza
NIM/TM : 18060047/2018
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 26 Februari 2024

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Pembimbing	: Dr. Muhammad Irfan, SE, M.Si	1. 
2.	Penguji 1	: Isra Yeni, SE, M.Si	2. 
3.	Penguji 2	: Dr. Joan Marta, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rafiq Mumtaza
NIM/TM : 18060047/2018
Tempat/Tanggal Lahir: Air Bangis/9 September 1999
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat
No. HP/Telepon : 082286542718
Judul Skripsi : Analisis Efisiensi Layanan Pemerintah Daerah Pada Pendidikan SMP Di Provinsi Sumatera Barat: Pendekatan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), Baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Departemen.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 06 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Rafiq Mumtaza
NIM. 18060047

ABSTRAK

Rafiq Mumtaza (18060047) : Analisis Efisiensi Layanan Pemerintah Daerah Pada Pendidikan SMP di Provinsi Sumatera Barat: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi pelayanan pemerintah daerah dibidang pendidikan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017-2019. Penelitian ini dibagi menjadi dua model penelitian. Model pertama menggunakan variabel input belanja pendidikan per kapita, rasio siswa-guru, dan rasio anak usia 13-15 tahun per sekolah. Sedangkan variabel output yang digunakan berupa hasil nilai ujian nasional (UN) dan angka partisipasi kasar. Kemudian pada model kedua, menggunakan variabel belanja pendidikan per kapita, rasio siswa-guru, rasio anak usia 13-15 tahun per sekolah, dan rasio siswa-kelas. Sedangkan variabel output yang digunakan berupa hasil nilai ujian nasional (UN), angka partisipasi kasar, dan harapan lama sekolah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Variabel Return to Scale (VRS). Variabel penelitian ini terdiri dari variabel input dan variabel output. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat efisiensi pelayanan pemerintah pada bidang pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang masih belum efisien,

Kata Kunci: Pendidikan, Efisiensi, dan *Data Envelopment Analysis* (DEA)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Efisiensi Layanan Pemerintah Daerah Pada Pendidikan SMP Di Provinsi Sumatera Barat: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Terimakasih atas layanan dan perhatian yang diberikan.
2. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M. Si selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Bapak Dr. Joan Marta, SE, M. Si selaku Sekretaris Departemen Universitas Negeri Padang. Terimakasih atas layanan dan perhatian yang diberikan.
3. Bapak Dr. Muhammad Irfan, SE, M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Isra Yeni, S.E, M.Si dan Bapak Dr. Joan Marta, S.E, M.Si selaku penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, saran, serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi beserta seluruh karyawan yang telah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama proses menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi.

6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Terimakasih atas layanan dan perhatian yang diberikan.
7. Kak Asma Lidya, Amd selaku Admin Jurusan Ilmu Ekonomi yng telah memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam mnuntaskan misi skripsi in dan membantu penulis dallam hal pengurusan administrasi.
8. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Bapak Nofiardi dan Ibu Wirdah Ningsih yang telah mencintai, menyanyangi, memberikan dukungan dan perhatian, doa yang tiada henti kepada peneliti. Terimakasih telah bersabar menunggu peneliti menyelesaikan studi ini.
9. Adik-adikku tersayang, Vivia Mustaqima dan Najla Sajida yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dengan baik.
10. Sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi dan studi ini. Teman-teman IE FE UNP yang telah berbagi cerita dan pengalaman suka dan duka serta rekan-rekan sesama bimbingan akademik yang sama-sama berjuang, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sanak Saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan do'a dan dukungan terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Animator-animator dan Sutradara anime-anime jepang yang telah menciptakan film anime yang sangat bagus dan luar biasa yang menjadi teman bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Produser-produser game yang telah menciptakan game yang sangat keren dan luar biasa yang menjadi teman penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan peneliti ucapkan terima kasih, semoga apa yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun demi perbaikan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada saya yang menulis dan khususnya untuk semua pihak yang membaca.

Padang, 31 mei 2024

Penulis
Rafiq Mumtaza

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Pendidikan.....	17
a. Pengertian Pendidikan.....	17
b. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan.....	20
c. Pengukuran Kinerja, Hasil, dan Indikator Bidang Pendidikan.....	22
2. Pelayanan Publik	23
a. Pengertian Pelayanan Publik	23
b. Jenis-jenis Pelayanan Publik	26
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik.....	26

d.	Prinsip Kualitas Pelayanan Publik.....	27
3.	Efisiensi.....	29
a.	Definisi Efisiensi	29
b.	Efisiensi Pendidikan	29
c.	Jenis Efisiensi	30
d.	Metode Pengeukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik	31
e.	Efisiensi dan Teori Produksi.....	32
f.	Efisiensi Ekonomi.....	34
4.	<i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA).....	36
a.	Pengertian <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA).....	36
b.	Model-model pada <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA)	36
c.	Orientasi Dalam <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA).....	41
d.	Kelebihan dan Kekurangan <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA) ..	42
B.	Penelitian Terdahulu	43
C.	Kerangka Konseptual	47
BAB III METODE PENELITIAN		55
A.	Desain Penelitian.....	55
B.	Populasi dan Sampel	56
C.	Jenis dan Sumber Data	56
D.	Definisi Operasional Variabel	57
1.	Belanja Fungsi Pendidikan Perkapita	57
2.	Rasio Siswa-Guru	57
3.	Rasio Jumlah Sekolah Per Anak Usia 13-15 Tahun	57

4. Rasio Siswa-Kelas Rata-rata	57
5. Hasil Nilai Ujian Nasional (UN)	59
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP	59
7. Harapan Lama Sekolah	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	62
B. Klasifikasi Wilayah Kabupaten dan Kota	63
C. Dekriptif Variabel Penelitian.....	66
1. Belanja Fungsi Pendidikan Perkapita	66
2. Rasio Siswa-Guru	67
3. Rasio Anak Usia 13-15 Tahun Per Sekolah SMP	69
4. Rasio Siswa-Kelas	70
5. Rata-rata Hasil Nilai Ujian Nasional (UN)	71
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP	73
7. Harapan Lama Sekolah	75
D. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi	77
E. Hasil Perbandingan Analisis DEA Per Model	82
F. Pembahasan Analisis DEA per Model.....	89
1. Layanan Pemerintah Daerah Pada Pendidikan SMP Yang Efisien dan Tidak Efisien di Provinsi Sumatera Barat Model 1	89

2. Layanan Pemerintah Daerah Pada Pendidikan SMP Yang Efisien dan Tidak Efisien di Provinsi Sumatera Barat Model 2.....	93
BAB V KESIMPULAN.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Jumlah Sekolah di Provinsi Sumatera Barat 2017-2019	9
Tabel 2. Jumlah Guru di Provinsi Sumatera Barat 2017-2019.....	10
Tabel 3. Rata-rata Hasil Nilai UN Tingkat SMP 2017-2019.....	12
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	44
Tabel 5. Variabel dan Model Yang Digunakan Dalam Pengukuran Efisiensi Layanan Pemerintah Daerah Pada Pendidikan SMP di Provinsi Sumatera Barat.	54
Tabel 6. Data dan Sumber Data	57
Tabel 7. Statistik Deskriptif Belanja Pendidikan Perkapita	66
Tabel 8. Statistik Deskriptif Rasio Siswa-Guru.....	68
Tabel 9. Statistik Deskriptif Rasio Sekolah Per anak Usia 13-15 Tahun.....	69
Tabel 10. Statistik Deskriptif Rasio Siswa-Kelas.....	71
Tabel 11. Statistik Deskriptif Rata-rata Hasil Nilai Ujian Nasional (UN).....	72
Tabel 12. Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP	74
Tabel 13. Statistik Deskriptif Harapan Lama Sekolah.....	75
Tabel 14. Hasil Efisiensi Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.....	79
Tabel 15. Tabulasi Hasil Perhitungan Skor Efisiensi Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Pada Model 1	80
Tabel 16. Tabulasi Hasil Perhitungan Skor Efisiensi Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Pada Model 2	81
Tabel. 17. Hasil Efisiensi dan Perbandingannya Tahun 2017	83
Tabel. 18. Hasil Efisiensi dan Perbandingannya Tahun 2018	85

Tabel. 19. Hasil Efisiensi dan Perbandingannya Tahun 2019 88

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Anggaran Pendidikan 2016-2019	6
Gambar 2. Data Anggaran Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2017-2019	7
Gambar 3. Kurva Batas Kemungkinan Produksi.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	104
1. Data Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	105
2. Data Pendidikan	106
a. Data Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	106
b. Data Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	107
c. Data Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	108
3. Data Penelitian	109
a. Data Penelitian Model 1 Tahun 2017	109
b. Data Penelitian Model 1 Tahun 2018	110
c. Data Penelitian Model 1 Tahun 2019	111
d. Data Penelitian Model 2 Tahun 2017	112
e. Data Penelitian Model 2 Tahun 2018	113
f. Data Penelitian Model 2 Tahun 2019	114
4. Data Hasil Penelitian	115
a. Data Hasil Penelitian Model 1 Tahun 2017	115
b. Data Hasil Penelitian Model 1 Tahun 2018	116
c. Data Hasil Penelitian Model 1 Tahun 2019	118
d. Data Hasil Penelitian Model 2 Tahun 2017	119
e. Data Hasil Penelitian Model 2 Tahun 2018	121
f. Data Hasil Penelitian Model 2 Tahun 2019	122

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah pemerintahannya. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Menurut Budiarto (2003) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pembentukan pemerintahan tentunya memiliki tujuan dan fungsi, adapun salah satu fungsi dari pembentukan pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kepentingan publik atau masyarakat di wilayah pemerintahan tersebut.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Menurut Niswaty, etc (2019) Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Salah satu bidang pelayanan publik yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat selain kesehatan, ialah pelayanan publik di bidang pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan suatu proses untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan untuk membentuk karakter dan etika manusia. Menurut Ansari (2012) Pendidikan adalah komponen utama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Mengingat hal tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi yang berkualitas untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Peranan pendidikan diantaranya adalah mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk disumbangkan bagi kesejahteraan umum sebagai warga negara yang aktif.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (education as investment) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investment) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama (Widiansyah, 2017). Investasi dalam pendidikan merupakan penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan itu. Pengalokasian anggaran di dunia pendidikan perlu diperhitungkan cermat, sehingga tuduhan kebermanfaatan dunia pendidikan dalam pembangunan dapat di tepis.

Terdapat berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan seperti pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, efektifitas dan efisiensi

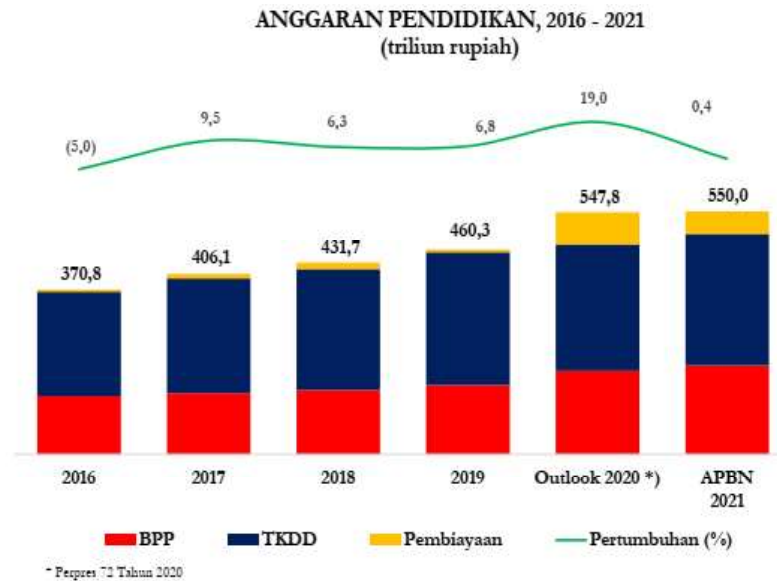
pendidikan. Namun, dengan dalih keterbatasan pembiayaan, akses transportasi sulit dijangkau, serta berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Menurut Esnir (2015) menyatakan bahwa kurang lebih 2,5 juta anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Mayoritas dari mereka, yakni sebanyak 1,9 juta anak tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah, sedangkan sisanya tidak dapat menuntaskan pendidikan dasar. Alasannya beraneka ragam, mulai dari faktor ekonomi hingga aksesibilitas. Tentu ini menjadi bukti bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menerima pendidikan dengan sebagaimana seharusnya.

Dalam konteks analisis efisiensi layanan pemerintah daerah tersebut, peneliti memilih kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat sebagai daerah penelitian. Salah satu daerah dengan pendidikan yang masyarakatnya yang cukup rendah adalah Sumatera Barat. Berdasarkan catatan Kemendagri pada juni 2021 jumlah penduduk Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 5,6 juta jiwa. terdapat 1,04 juta jiwa (18,5%) penduduk Sumbar yang tamat Sekolah Dasar (SD), ada 911,35 ribu jiwa (16,28%) yang belum tamat SD, serta ada 1,24 ribu jiwa (22,21%) yang tidak/belum sekolah (Kemendagri, 2021). Adapun untuk anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Jamaris Jamna (2017) mengatakan bahwa kualitas pendidikan pada daerah di Provinsi Sumatera Barat belum merata, terlihat hanya dengan beberapa daerah yang mellihatkan prestasi, sedangkan lainnya belum terlihat.

Hanya beberapa daerah yang memiliki kualitas yang sering muncul ke permukaan dengan prestasinya antara lain, Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Kota Padang. Untuk melakukan pemerataan pendidikan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan seperti mengutamakan pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang selama ini belum terdapat aturan baku, meskipun sudah terdapat peningkatan akreditasi di beberapa sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian keuangan tentang anggaran pendidikan tahun 2016-2019 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membenahi dan menyelesaikan berbagai masalah di bidang pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar untuk anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ada pada tahun 2019 yaitu sebesar 155 Milyar Rupiah, kemudian anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa yang tertinggi berada tahun 2019 yaitu sebesar 299 Milyar Rupiah dan terakhir anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,5 Triliun Rupiah. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Sumber: Kemenkeu 2022

Gambar 1.1.
Data Anggaran Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2017-2019

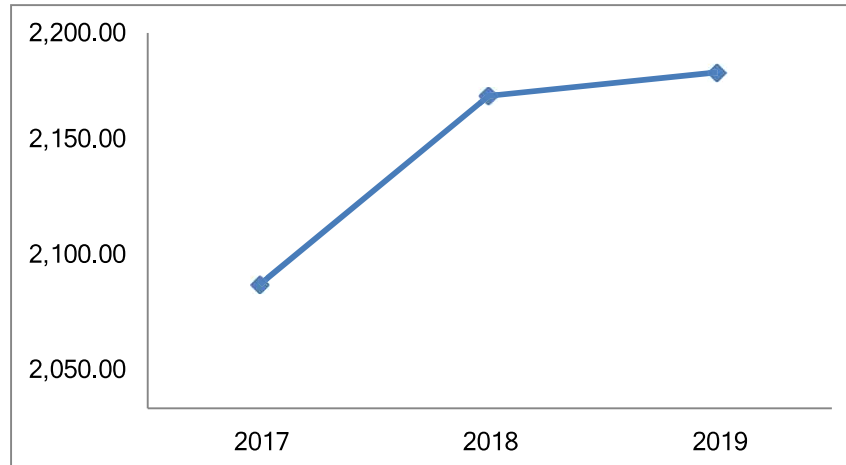
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan tentang anggaran pendidikan tahun 2016-2021 dapat dilihat bahwa porsi anggaran pendidikan terbesar dialokasikan melalui TKDD. Kemudian, Berturut-turut melalui BPP dan Pembiayaan Anggaran. Secara nominal, anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat dari Rp. 370 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 460 miliar pada tahun 2019 atau secara rata-rata meningkat sebesar 7,5 persen.

Pada tahun 2020, outlook anggaran pendidikan meningkat secara signifikan menjadi Rp. 547 miliar atau meningkat sebesar 19 persen dari realisasinya tahun pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penyesuaian anggaran pendidikan dalam tahun 2020 akibat

dilakukannya penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak Covid-19, Sehingga untuk menjadi porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan melalui TKDD dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp. 299 miliar. Jumlah ini mencapai 54,4 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2021. Besarnya porsi anggaran pendidikan di TKDD tersebut disebabkan kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah.

Kemudian jika dilihat dari data provinsi terkait anggaran biaya pendidikan adalah sebagai berikut :



Sumber: Kemenkeu 2022

Gambar 1.2.
Data Anggaran Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2017-2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian keuangan tentang anggaran pendidikan di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2017 anggaran biaya pendidikan provinsi

Sumatera Barat adalah sebesar 1.898.47. kemudian mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.124.48 dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.152.80. Pengalokasian dari peningkatan anggaran pendidikan ini menggambarkan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas terutama sumber daya manusia di Sumatera Barat.

Alokasi anggaran pendidikan dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah anggaran yang disediakan/direalisasikan untuk membiayai suatu kegiatan. Anggaran pendidikan juga dapat diartikan sebagai besaran jumlah yang disediakan untuk untuk membiayai pendidikan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan daerah. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.

Menurut Nugroho (2013) secara umum realisasi anggaran pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor perencanaan anggaran, peraturan/kebijakan pemerintah, sumber daya manusia, teknis, koordinasi, pengadaan barang dan jasa. Masing-masing dikelompokkan menjadi faktor administrasi, organisasi, psikologis, serta kultur pengelolaan anggaran. Proses perencanaan yang memakan waktu lama serta proses kebijakan yang berubah-ubah menjadikan target realisasi tidak tercapai.

Pelayan publik yang diberikan pemerintah dalam dunia pendidikan yang berupa sarana dan prasarana adalah adanya pembangunan sekolah dan merupakan tempat atau wadah bagi peserta didik untuk belajar dan menggali

ilmu lebih banyak serta dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Untuk lebih jelasnya tentang sarana sekolah yang diberikan oleh pemerintah untuk provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah Provinsi Sumatera Barat

	2017	2018	2019
SMP	800	810	827

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah sekolah yang ada di Sumatera Barat berdasarkan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019. Di tahun 2017 ke tahun 2019 jumlah sekolah jenjang pendidikan SMP jumlah sekolah secara keseluruhan mengalami peningkatan dan melalui peningkatan jumlah sekolah ini sudah nampak upaya pemerintah dalam membenahi goncangan pendidikan.

Beralih dari peningkatan dan banyaknya jumlah sekolah, masih banyak daerah terpencil yang masih kesulitan memperoleh pendidikan yang disebabkan oleh satu dan lain hal seperti akses ke sekolah yang sulit, tidak memiliki biaya pendidikan dan keterbatasan lainya yang mengakibatkan anak usia sekolah tidak dapat memperoleh pendidikan. Hal ini masih menjadi PR bagi pemerintahan agar dapat memperhatikan dunia pendidikan terlebih lagi pendidikan untuk daerah terpencil dan rakyat kecil.

Selanjutnya upaya pemerintah peningkatan pendidikan yaitu melalui tenaga pendidik, berikut tabel gambaran tenaga pendidik di Sumatera Barat :

Tabel 1.2
Jumlah Guru Provinsi Sumatera Barat

	2017	2018	2019
SMP	17 622	17 334	17 619

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 terkait jumlah guru di provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat bahwasanya jumlah guru SMP pada tahun 2017 mencapai 17.622 terbanyak dari pada tahun-tahun setelahnya. Hal ini karena memang sejalan dengan jumlah sekolah yang tersedia yang memang lebih banyak gedung sekolah. Dengan jumlah guru yang relatif banyak di provinsi Sumatera Barat ini tentunya hal ini dapat memenuhi kebutuhan pendidikan akan tenaga guru untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anak didiknya. Dari beberapa data di atas penelitian ini berfokus pada SMP di Provinsi Sumatera Barat.

Namun meskipun jumlah terbilang guru memadai di sebagian besar kabupaten/kota, terdapat alokasi guru yang tidak merata di berbagai daerah yang disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dan juga letak daerah yang terpencil, sehingga berdampak dalam hal distribusi guru sehingga terjadi kesenjangan antara wilayah yang ada dalam kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumatera Barat. Terlebih dari hal tersebut, kenyataan di lapangan banyak fasilitas pembelajaran seperti laboratorium, referensi pustaka, studio atau workshop yang ada di sekolah tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah guru tidak siap untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut. Oleh karena itu, maka pencapaian standar

kompetensi guru merupakan suatu keharusan. Sebab tanpa ada standar maka jaminan kepada stakeholder tidak mungkin terpenuhi secara optimal.

Selanjutnya untuk melihat keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional. Ujian Nasional bukan saja menjadi tolak ukur keberhasilan bagi siswa, tetapi juga bagi dunia pendidikan. Ujian nasional merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pendidikan, karena akan memberikan arah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ujian nasional akan menjadi tolak ukur bukan hanya bagi siswa melainkan bagi seluruh bagian pendidikan seperti guru, orang tua maupun masyarakat serta pemerintahan. Dengan kata lain kegagalan ataupun keberhasilan peserta didik bukan hanya kegagalan dan keberhasilan mereka saja melainkan juga menjadi kegagalan dan keberhasilan seluruh elemen pendidikan.

Pada tabel 1.4 dibawah dapat dilihat rata-rata nilai nilai UN tingkat smp dari tahun 2017-2019 di provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 51,37 persen pada tahun 2017 menjadi 53,46 persen pada tahun 2019, nilai rata-rata ini naik sebesar 2,09 persen dari tahun 2017. Pada tahun 2019 daerah kota Bukittinggi menjadi daerah dengan nilai rata-rata UN tertinggi dengan nilai 64,24 persen, sedangkan daerah dengan nilai UN terendah ditempati oleh daerah kabupaten Padang Pariaman dengan nilai 48,13 persen. Semakin tinggi nilainya maka semakin bagus, karena hal tersebut menunjukkan kualitas proses belajar mengajar di daerah tersebut semakin baik.

Meskipun mengalami peningkatan, masih banyak terdapat daerah kab/kota yang mendapatkan hasil nilai rata-rata Ujian Nasional di bawah nilai rata-rata UN provinsi. Hanya 8 kab/kota yang memperoleh nilai diatas nilai rata-rata UN provinsi sedangkan sisanya sebanyak 11 kabupaten/kota masih memperoleh nilai nilai rata-rata UN dibawah nilai rata-rata UN provinsi.

Tabel 1.3
Hasil Rata-Rata Nilai UN Tingkat SMP

Nama Wilayah	Hasil Rata –Rata Nilai UN Tingkat SMP		
	2017	2018	2019
Kab. Agam	51.4	51.92	52.17
Kab. Pasaman	48.22	48.05	48.53
Kab. Lima Puluh Kota	51.51	52.41	53.33
Kab. Solok	48.44	48.71	50.29
Kab. Padang Pariaman	48.22	46.94	48.13
Kab. Pesisir Selatan	43.9	49.3	51.51
Kab. Tanah Datar	53.45	53.83	55.79
Kab. Sijunjung	49.35	49.9	50.9
Kab. Kep. Mentawai	51.35	51.07	52.78
Kab. Solok Selatan	47.35	47.68	48.3
Kab. Dharmasraya	48.73	49.95	51.41
Kab. Pasaman Barat	47.6	48.13	50.01
Kota Bukittinggi	63.12	62.52	64.24
Kota Padang	57.02	59.21	58.42
Kota Padang Panjang	60.07	60.73	58.62
Kota Sawahlunto	55.1	54.76	55.54
Kota Solok	52.96	55.4	53.91
Kota Payakumbuh	59.51	59.75	60
Kota Pariaman	51.87	50.99	54.34
Prov. Sumatera Barat	51.37	52.41	53.46

Sumber : Kemendikbud, 2022

Untuk mengatasi permasalahan diatas, perlu dilakukan analisis efisiensi untuk biaya pendidikan agar dapat di ambil solusi yang tepat. Menurut Rambe (2020) Efisiensi merupakan hal penting yang harus

dilakukan oleh pemerintah daerah karena efisiensi merupakan salah satu prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Hasil penelitian Hu et al (2009) Menunjukkan bahwa sekolah di kabupaten kota utama memiliki efisiensi produk pendidikan yang lebih rendah meskipun memiliki input atau sumber daya pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya para pembuat kebijakan pendidikan mempertmbangkan fenomena ini secara serius untuk memotivasi guru, sedikit mengurangi waktu siswa di sekolah serta membuat sumber daya yang digunakan lebih efisien akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pendidikan. Analisis efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output. Analisis ini telah banyak dilakukan untuk menilai kinerja lembaga, baik lembaga profit maupun non profit.

Pengukuran efisiensi cenderung mudah apabila lembaga terkait hanya menggunakan 1 input dan menghasilkan 1 output saja. Namun, keadaan demikian tentunya jarang terjadi. Keadaan yang ini juga dialami oleh sektor publik, termasuk sekolah, yang biasanya menghasilkan layanan atau barang secara gratis dengan harga yang tidak ditentukan oleh kekuatan pasar. Analisis efektivitas ini sangat penting karena akan dapat menggambarkan atau menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah terealisasi kepada masyarakat atau belum. Seperti yang dijelaskan (Cristescu, 2010).

Efisiensi pelayanan merupakan perbandingan terbaik antara input pelayanan dan output pelayanan. Pelayanan akan efisien jika birokrasi pelayanan dapat memberikan dan menyediakan input pelayanan seperti biaya

dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat sebagai pengguna jasa. Sedangkan pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas seperti dari aspek biaya dan waktu pelayanan (Heryanto Monoarfa, 2012).

Umumnya terdapat beberapa cara untuk mengukur efisiensi suatu unit kegiatan. Namun, karena pada bidang pendidikan memiliki lebih dari satu output, maka diperlukan pendekatan yang memungkinkan untuk mengakomodir keadaan demikian. Dalam hal ini, metode yang diharapkan dapat memberikan hasil paling komprehensif adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Analisis DEA (Data Envelopment Analysis) menjadi alat dalam mengukur efisiensi melalui pendekatan Input – output. Kegunaan alat analisis DEA terhadap penelitian efisiensi belanja pendidikan adalah dapat mengetahui bagaimana sebaiknya belanja pendidikan digunakan sebaik mungkin dengan menyediakan pelayanan pendidikan berupa ketersediaan jumlah sekolah dan ketersediaan akan guru pengajar hingga daya tampung berupa murid dapat dilakukan dengan melihat daerah mana yang dapat melakukannya dengan paling efisien sehingga dijadikan panutan bagi daerah lainnya.

Kelebihan penggunaan alat analisa ini dibandingkan alat lain adalah pemilihan data lebih fleksibel, yang tidak membutuhkan asumsi hubungan fungsional antara variabel Input dan Output, dapat digunakan untuk menilai efisiensi, kualitas, efektivitas dan kombinasinya, memiliki satuan ukuran dari Input dan Output . DEA dapat berbeda – beda serta tidak memerlukan sebuah

asumsi bentuk fungsional untuk menghubungkan Input dengan Output dan dapat memberikan peringkat efisiensi berdasarkan data numerik dan tidak menggunakan opini subjektif dari seseorang.

Pendidikan menjadi tumpuan harapan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelayanan pemerintah atau pelayanan publik dalam dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam judul “**Analisis Efisiensi Layanan Pemerintah Daerah Pada Pendidikan SMP Di Provinsi Sumatera Barat: Pendekatan *Data Envelopment Analysis (DEA)*.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh adalah bagaimana tingkat efisiensi layanan pemerintah daerah pada pendidikan SMP di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017–2019.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi layanan pemerintah daerah pada pendidikan SMP di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat serta melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan topik pelayanan publik, khususnya efisiensi pelayanan pemerintah daerah bidang pendidikan.

2. Bagi Peneliti

- a. Mengetahui analisis efisiensi pelayanan pemerintah daerah di sektor pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mengasah daya analisis peneliti dalam memecahkan masalah pendidikan.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian dapat dijadikan alat evaluasi atas kebijakan yang telah ada dan sebagai sarana informasi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.